UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Peran Dinas Penerangan Kota Palangkaraya di era awal pelaksanaan kebijakan otonomi daerah
ATTA, Dr. Riswandha Imawan
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Rozali. 2000. Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Fedaralisme Sebagai Suatu Alternatif. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Anderson, James E. 1978. *Public Policy Making.* Halt : Rinehart and Winston.

Arikunto, Suharsimi. 1991. Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka Cipta.

Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Daerah Depdagri. *Japan-Indonesia Local Administration Seminar.* Tanggal 7-8 Agustus 2000.

Dwiyanto, Agus. 1999. Modul Matrikulasi MAP-UGM, Prinsif-prinsif Administrasi Publik. Yogyakarta : MAP-UGM.

Djuroto, Totok. 2000. Manajemen Penerbitan Pers. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Darwin, Muhadjir. 1994. Teori Organisasi Publik. Yogyakarta : MAP-UGM.

Eaton, Joseph W., *et al.* 1986. Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional dari Konsep ke Aplikasi *(Institution Building and Development : from concepts to application)* Edisi Terjemahan, Penerjemah Pandam Guritno dan Aldi Jeni. Jakarta : Universitas Indonesia.

Gomes, Faustino Cardoso. 1995. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : Andi Offcet.

Irianto, Jusuf. 2001. Tema-Tema Pokok Manajemen Sumber Daya Manusia. Surabaya : Insan Cendekia.

Jones, Gareth R. 1995. *Organizational Theory Text and Cases.* Texas : Addison Wesley Publishing Company.

Kuczmarski, Susan Smith dan Kuczmarski Thomas D. 1995. *Values-Based Leadership.* New Jersey : Prentice Hall.

Mardiasmo. 2002 a. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Andi Offcet.

_____, 2002 b. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi Offcet.

MILIK PERPUSTAKAAN
PROGRAM PASCA SARJANA
U G M.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Peran Dinas Penerangan Kota Palangkaraya di era awal pelaksanaan kebijakan otonomi daerah
ATTA, Dr. Riswandha Imawan
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Muhadjir, Noeng. 1996. Metodologi Penelitian Kualitatif : Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik dan Realisme Metaphisik, Edisi III. Yogyakarta : Rake Sarasin.

Mohtar, Mas'oed. 1999. Modul Kuliah Ekonomi-Politik Pembangunan. Yogyakarta : MAP-UGM.

Miles dan Hubberman. 1992. *Practical Research; Planning and Design.* New York : Macmillan.

Narbuko, Cholid & Abu Achmadi. 2001. Metodologi Penelitian. Jakarta : Bumi Aksara.

Nanus, Burt. 1992. *Visionary Leadership.* San Francisco : Jossey-Bass Publishers.

Osborne, David, Gaebler, Ted. 1992. *Reinventing Government, how the enterpreneural spirit is transforming the public sector.* New York : Plume.

Prabowo, Maxim D., dkk. 2002. Renai Jurnal Politik Lokal & Sosial-Humaniora Penguatan *"Civil Society"*. Yogyakarta : Pustaka Pereik.

Rachbini, J. Didik. 2001. Pembangunan Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta : Gramedia.

Robbins, P. Stephen. 1996. *Organizational Behavior; Concepts, Controversies, Applications.* New Jersey : Prentice-Hall International, Inc., Englewood Cliffs.

Salam, Dharma Setyawan. 2002. Manajemen Pemerintahan Indonesia. Jakarta : Djambatan.

Siagian, P. Sondang. 2000. Teori Pengembangan Organisasi. Jakarta : Bumi Aksara.

Steers, Richard M. 1997. Efektivitas Organisasi, Terjemahan. Jakarta : PPm Erlangga

Surbakti, Ramlan. 1999. Memahami Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia.

Sutarto. 1998. Dasar-dasar Organisasi. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Sugiyono. 2001. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta.

Tjokrowinoto, Moeljarto. 2001. Birokrasi Dalam Polemik.Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Peran Dinas Penerangan Kota Palangkaraya di era awal pelaksanaan kebijakan otonomi daerah
ATTA, Dr. Riswandha Imawan
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Thoha, Miftah. 1985. Manajemen Pembangunan Daerah Tingkat II. Dalam Prisma Nomor 12 Tahun 1985.

_____, 1993. Pembinaan Organisasi : Proses Diagnosa Dan Intervensi. Jakarta : Rajawali Pers.

Usmara, A. 2002. Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : Amara Books.

Utomo, W. 1997. Pemberdayaan Birokrasi Dan Aparatur Negara Dalam Membangun Indonesia Dari Daerah, Makalah Seminar Sehari Dalam Rangka Dies Natalis Ke 42 FISIPOL UGM tanggal 18 September 1997.

Wahab, Solichin A. 1997. Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Akasara.

Widodo, Erna & Mukhtar. 2000. Kontruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif. Yogyakarta : Avyrrouz.

Viljoen, John. 1994. *Strategic Management Planning and Implementing Succerssfull Corporate Strategies.* Sydney : Longman.

Peraturan-peraturan :

UU RI Nomor : 40 Tahun 1999 tentang Pers, tanggal 23 September 1999, Jakarta.

UU RI Nomor : 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, tanggal 28 Desember 2002, Jakarta.

PP RI Nomor : 55 Tahun 1970 tentang Radio Siaran Non Pemerintah, tanggal 17 Desember 1970, Jakarta

Peraturan Menpen RI Nomor : 01/Per/Menpen/1998 tentang Ketentuan-Ketentuan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers, tanggal 5 Juni 1998, Jakarta.

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor : 04 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan, tanggal 25 Pebruari 1998, Palangka Raya.

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor : 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penerangan Kota Palangka Raya, tanggal 23 Oktober 2000, Palangka Raya.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Peran Dinas Penerangan Kota Palangkaraya di era awal pelaksanaan kebijakan otonomi daerah
ATTA, Dr. Riswandha Imawan
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 14 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Perda Kota Palangka Raya No. : 04 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan, tanggal 27 Maret 2001, Palangka Raya.

Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 51 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di Lingkungan Dinas Kota Palangka Raya, tanggal 16 April 2001, Palangka Raya.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Peran Dinas Penerangan Kota Palangkaraya di era awal pelaksanaan kebijakan otonomi daerah
ATTA, Dr. Riswandha Imawan
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Peran Dinas Penerangan Kota Palangkaraya di era awal pelaksanaan kebijakan otonomi daerah
ATTA, Dr. Riswandha Imawan
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

PANDUAN WAWANCARA
PERAN DINAS PENERANGAN KOTA PALANGKA RAYA DI ERA AWAL PELAKSANAAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH

A. Pertanyaan untuk peran Dispen Kota Palangka Raya

1. Apa peran Dispen pada era kebijakan otonomi daerah?
2. Apa saja Kebijakan yang telah diambil oleh Dispen dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan perannya?
3. Tugas pokok dan fungsi organisasi dalam implementasinya diwujudkan melalui visi dan misi organisasi kemudian dijabarkan dalam Program Kerja Dispen. Program kerja apa sajakah yang dikerjakan oleh Dispen untuk menjalankan misi penerangan, informasi dan komunikasi?
4. Apa saja kendala untuk merealisasikan program kerja Dispen?
5. Kebijakan apa saja yang diambil oleh Dispen untuk mengatasi setiap permasalahan yang menghambat pelaksanaan program kerja?
6. Dalam menjalankan peran barunya Dispen, penambahan sarana dan prasarana apakah yang telah dilakukan untuk menunjang pelaksanaan tugas sehingga misi dapat diwujudkan?
7. Manajemen kerja apakah yang diterapkan oleh Dispen dalam menjalankan peran barunya?

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Peran Dinas Penerangan Kota Palangkaraya di era awal pelaksanaan kebijakan otonomi daerah
ATTA, Dr. Riswandha Imawan
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

B. Pertanyaan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi peran Dinas Penerangan Kota Palangka Raya

B.1. Faktor Politik (Eksternal)

a. Pertanyaan untuk *good governance*

1. Apakah program kerja Dispen diumumkan kepada publik lewat media internal (Jurnal Dispen) maupun media eksternal sepertii surat kabar atau media televisi daerah (TVRI Daerah)?
2. Apakah pelayanan publik dilakukan secara terbuka oleh Dispen?
3. Pada pelaksanaan tupoksi Dispen, dalam bidang pekerjaan apa yang bisa atau sering terjadi penyimpangan keuangan atau kewenangan?
4. Bagaimana kontrol secara internal organisasi untuk memperkecil penyimpangan dalam penggunaan dana untuk menjalankan program kerja?
5. Apakah Dispen Palangka Raya memiliki Laporan Pertanggung jawaban kerja yang diumumkan kepada publik ?
6. Apakah laporan kinerja Dispen mendapat tanggapan dari publik yang berkepentingan (Pers, LSM atau Pemerhati) ?
7. Apakah Dispen sering menerapkan peraturan yang bersifat memaksa seperti teguran atau pembekuan ijin terhadap pengguna jasa?
8. Dalam pembinaan pers daerah adakah Dispen mengeluarkan peraturan yang bersifat pemaksaan kehendak?

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Peran Dinas Penerangan Kota Palangkaraya di era awal pelaksanaan kebijakan otonomi daerah
ATTA, Dr. Riswandha Imawan
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

9. Apa saja kebijakan Dispen yang merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Daerah dalam bidang penerangan dilakukan bertentangan dengan Perudangan yang lebih tinggi?
10. Apakah kebijakan Dispen selalu mengarah kepada tugas pokok, fungsi dan peran organisasi yang diemban?

B.2. Faktor Organisasional (Internal)

a. Pertanyaan untuk struktur organisasi Intern

1. Apakah struktur formal unit kerja Dispen membantu pelaksanaan tugas?
2. Dalam organisasi Dispen, apakah semua struktur yang ada dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal?
3. Struktur organisasi manakah yang memiliki volume pekerjaan terbanyak di antara unit kerja di lingkungan organisasi Dispen?
4. Menurut pendapat anda, apakah struktur Dispen telah sesuaii dengan desain organisasinya?
5. Apakah struktur organisasi yang ada telah membuka peluang untuk melakukan inovasi dan pembaharuan sesuai dengan misi organisasi?

b. Pertanyaan untuk kepemimpinan

1. Seberapa jauh pimpinan Dispen melakukan rapat atau pertemuan dengan staf serta karyawan dengan tujuan memotivasi kerja seluruh anggota organisasi?

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Peran Dinas Penerangan Kota Palangkaraya di era awal pelaksanaan kebijakan otonomi daerah
ATTA, Dr. Riswandha Imawan
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

2. Bagaimana hubungan informal antara pimpinan dan karyawan yang ada?
3. Menurut pendapat Bapak/Ibu bagaimanakah kemampuan pimpinan Dispen untuk mengorganisir seluruh akativitas organisasi yang ada?
4. Dalam menjalankan program kerja adakah unit organisasi tidak dilibatkan sesuai dengan fungsi yang seharusnya dijalankan?
5. Apabila ada permasalahan yang timbul di dalam organisasi, apakah pimpinan Dispen memecahkan masalah dan memutuskannya secara sendiri atau melibatkan Pimpinan di bawahnya?
6. Jika timbul masalah dalam organisasi, apakah pimpinan segera berupaya untuk memecahkannya, tanpa menunda?

c. Pertanyaan untuk sumber daya manusia

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah tingkat pendidikan yang dimiliki akan menujang bidang pekerjaan dan mempengaruhi pelaksanaan tugas di Dispen?
2. Menurut Bpk/Ibu, sebaiknya penempatan seorang pegawai harus memperhatikan faktor apa saja?
3. Apakah penempatan Bapak/Ibu sekarang sudah sesuai dengan keinginan dan bakat yang dimiliki?
4. Menurut Bapak/Ibu, apa yang membuat terdorong untuk mengikuti Diklat Struktural dan atau Fungsional?

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Peran Dinas Penerangan Kota Palangkaraya di era awal pelaksanaan kebijakan otonomi daerah
ATTA, Dr. Riswandha Imawan
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

5. Menurut Bpk/Ibu, apa manfaat yang diperoleh melalui pendidikan & latihan struktural dan teknis fungsional atau kursus keterampilan dii bidang kepeneranganan?
6. Kursus apa yang pernah Bpk/Ibu ikuti di bidang kepeneranganan dan media massa?
7. Menurut Bpk/Ibu bagai mana cara untuk meningkatkan pelayanan Pers daerah?

Peran Dinas Penerangan Kota Palangkaraya di era awal pelaksanaan kebijakan otonomi daerah
ATTA, Dr. Riswandha Imawan
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

Nomor : 1578.4/UGM/MAP/XI/02
Hal : Permohonan Pembimbing Tesis
Lamp. : -

Yogyakarta, 13 Nopember 2002

Kepada Yth .
1. Dr. Riswandha Imawan
2. Drs. H. Suharyanto, M.Si
Fisipol
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Dengan hormat,

Pengelola Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada (MAP UGM) Yogyakarta mohon kesediaan Bapak/ Ibu untuk menjadi Dosen Pembimbing I / II mahasiswa MAP UGM Angkatan XXVI / XXVII atas nama :

Nama Mahasiswa : **Atta, Drs.**
Nomor Mahasiswa : **7801/PS/MA/01**
Judul Tesis : **Pergeseran Peran Dinas Penerangan Kota Palangkaraya**

Mahasiswa tersebut akan segera menghubungi Bapak dengan membawa pra-proposalnya. Proses pembimbingan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak.

Atas kesediaan dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.

Pengelola Prog. Studi MAP UGM
U.b.

Dr. Warsito Utomo

Tembusan :
Mahasiswa ybs

Peran Dinas Penerangan Kota Palangkaraya di era awal pelaksanaan kebijakan otonomi daerah
ATTA, Drs. Riswandha Imawan
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
Jl. Prof. Dr. Sardjito – SEKIP, Yogyakarta, 55281, Telp. (0274) 563825, 588234, 902117, Fax. (0274)589655

Nomor : 2.01/UGM/MAP/Survey/03
Hal : Ijin penelitian

Yogyakarta, 10 Januari 2003

Kepada Yth. Bapak Walikota Palangka Raya
di
Palangka Raya

Dengan hormat,

Dalam rangka penyusunan tugas akhir/tesis, Pengelola Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada (MAP-UGM) Yogyakarta memintakan ijin bagi mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan penelitian di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama Mahasiswa	: Atta, Drs.
Nomor Mahasiswa	: 7801/PS/MAP/01
Konsentrasi	: Manajemen Publik
Judul Tesis	: Pergeseran Peran Dinas Penerangan Di Era Awal Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Dinas Penerangan Kota Palangka Raya)

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.

Tim Pengelola Program Studi MAP – UGM
U.b.

Dr. Warsito Utomo

Tembusan Yth.:
1. Kepala Badan Kesbang-Limas Kota Palangka Raya di Palangka Raya
2. Kepala Dinas Penerangan Kota Palangka Raya di Palangka Raya

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

BADAN KESBANG DAN LINMAS KOTA PALANGKA RAYA

Peran Dinas Penerangan Kota Palangkaraya di era awal pelaksanaan kebijakan otonomi daerah
ATTA, Drs. Riswandha Imawan
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Jalan Tjilik Riwut Km 5,5 Telepon (0536) 31106 Palangka Raya 73112.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/ 064 /KBLM/ I / 2003.

Berdasarkan Surat dari Tim Pengelola Program Studi MAP-UGM Universitas Gajah Mada Nomor : 2.01/UGM/MAP/Survey/03 tanggal 10 Januari 2003, Perihal : Ijin Penelitian. Dengan ini Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Palangka Raya memberikan Ijin kepada :

1. a. Nama	:	ATTA, Drs.
b. No.Mahasiswa	:	7801/PS/MAP/01
c. Program Study	:	MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK.
d. Alamat	:	Jl. Yakut No. 644 Palangka Raya.
2. Judul Penelitian	:	PERGESERAN PERAN DINAS PENERANGAN DI ERA AWAL PELAKSANAAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH (Studi Kasus di Dinas Penerangan Kota Palangka Raya).
3. Lokasi	:	Dinas Penerangan Kota Palangka Raya.
4. Waktu	:	Mulai Tanggal 28 Januari 2003 S/d 28 April 2003.

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Untuk mendapatkan bahan-bahan keterangan yang diperlukan hendaknya menghubungi Pejabat Pemerintah dan Swasta dengan menunjukkan Surat Keterangan ini.
2. Dalam rangka mengadakan penelitian yang dimaksud agar supaya mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku serta selalu memelihara ketertiban dan ketentraman lingkungan setempat dan tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan Program.
3. Agar menyampaikan laporan hasil Penelitian tersebut kepada Bapak Walikota Palangka Raya Cq. Ke Badan Kesbang dan Linmas Kota Palangka Raya.
4. Diminta dengann hormat kepada Instansi Pemerintah dan Tokoh - Tokoh Masyarakat/Swasta yang ada kaitannya dengan penelitian yang dimaksud, diharapkan dapat memberikan bantuan kepada yang bersangkutan.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Palangka Raya, 28 Januari 2003.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KOTA PALANGKA RAYA.

Drs. HARRIS RADIMAN P
Pembina
NIP. 010 072 651.

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Kalimantan Tengah
   Up. Kepala Badan Kesbang Linmas dan Satpol PP Kal-teng di P.Raya.
2. Kapolresta Palangka Raya di Palangka Raya.
3. Tim Pengelola Program Studi MAP-UGM di Yagyakarta
4. Kepala Dinas Penerangan Kota Palangka Raya.
5. Sdri ATTA, Drs. Di Tempat

Peran Dinas Penerangan Kota Palangkaraya di era awal pelaksanaan kebijakan otonomi daerah
ATTA, Dr. Riswandha Imawan
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PENERANGAN
Jl. Diponegoro 58, Telp / Fax. (0536) 21308
PALANGKA RAYA

SURAT KETERANGAN
Nomor : 30 /01/Dispen/03

Kepala Dinas Penerangan Kota Palangka Raya, dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

- Nama	: **Drs. ATTA**
- N I M	: 7801/PS/MAP/01
- Konsentrasi	: Manajemen Publik
- Program Studi	: Magister Administrasi Publik
- Perguruan Tinggi	: Universitas Gajah Mada Yogyakarta

benar telah mengadakan penelitian/observasi, pengumpulan data, melakukan wawancara dan diskusi di Kantor Kami sejak tanggal 28 Januari 2003 sd. 27 Februari 2003, dalam rangka penulisan/penyusunan Tesisnya yang berjudul :

"PERGESERAN PERAN DINAS PENERANGAN DI ERA AWAL PELAKSANAAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH (Studi Kasus Di Dinas Penerangan Kota Palangka Raya)".

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 28 Februari 2003
Kepala Dinas Penerangan Kota Palangka Raya
Plt.,

PEMERINTAH KOTA ★ DINAS PENERANGAN ★ PALANGKA RAYA

EDISON, S.H.
Pembina
NIP. : 050 059 019

Peran Dinas Penerangan Kota Palangkaraya di era awal pelaksanaan kebijakan otonomi daerah
ATTA Dr.Riswandha Imawan
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

-BADAN KESBANG DAN LINMAS KOTA PALANGKA RAYA

Jalan Tjilik Riwut Km 5,5 Telepon (0536) 31106 Palangka Raya 73112.

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/ 070/KBLM/ II / 2003.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat kota Palangka Raya dengan ini menerangkan ahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

1. a. Nama ; Drs. ATTA
   b. No.Mahasiswa : 780.1/PS/MAP/01
   c. Program Study : Magister Administrasi Publik.
   d. Alamat : Palangka Raya.

Benar telah mengadakan Penelitian di Pemerintah Kota Palangka Raya , dalam rangka penulisan/Penyusunan Tesisnya yang berjudul :

PERGESERAN PERAN DINAS PENERANGAN DI ERA AWAL PELAKSANAAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH (Studi Kasus di Dinas Penerangan Kota Palangka Raya).

2. Lokasi Penilitian : 1. Dinas penerangan kota Palangka Raya.
3. Waktu : Mulai Tanggal 28 Januari 2003 s/d 28 Februari 2003.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 28 Februari 2003.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KOTA PALANGKA RAYA

Drs. HARRIS RADIMAN.P
Pembina
NIP. 010 072 651.